

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi pembawaan manusia untuk mendambakan kehidupan yang akan datang lebih baik dari sekarang. Keinginan tersebut menjadi faktor pendorong utama usaha manusia untuk selalu memperbaiki kondisi kehidupannya. Usaha itu juga berlaku dalam kehidupan ber masyarakat. Usaha manusia melalui kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kondisi yang semakin baik tersebut sering dimaknai sebagai proses pembangunan masyarakat. Dengan demikian menjadi wajar pula apabila senantiasa ditemukan usaha manusia untuk mencari cara yang paling tepat dalam melakukan peningkatan kondisi kehidupan melalui pembangunan masyarakat tersebut.

Upaya mencari cara yang tepat ini dilakukan melalui suatu bentuk kajian pemberdayaan masyarakat. Pendekatan, strategi dan model yang merupakan hasil kajian tersebut kemudian dapat digunakan sebagai referensi operasional bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat. Pada dasarnya kajian tersebut dapat dikatakan sebagai proses belajar yang berkesinambungan. Hasil kajian yang diperoleh diterapkan dalam praktik pembangunan masyarakat, selanjutnya pengalaman pelaksanaannya baik yang bersifat *good* maupun *bad practices* dapat digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan pendekatan pada periode berikutnya. Tidak mengherankan apabila dalam rangka kajian dan praktik pembangunan masyarakat tersebut dikenal adanya berbagai perspektif. Kesemuanya itu merupakan manifestasi dari upaya untuk mencari kesempurnaan, di samping manifestasi adanya keanekaragaman manusia dalam memandang suatu persoalan.

Pembangunan masyarakat merupakan fenomena sepanjang manusia hidup atau sepanjang manusia hidup ber masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara terus-menerus, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Untuk memahami dan mendapatkan kejelasan tentang

fenomena tersebut dilakukan melalui kajian pembangunan masyarakat. Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai

kebutuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan dapat bersifat individual maupun kolektif, dan manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Usaha dalam pemenuhan kebutuhan pada prinsipnya tidak pernah berhenti. Selalu ada peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan ini, karena kebutuhan berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Suatu realitas dalam kehidupan sosial yang menunjukkan jika semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi maka akan dinamakan kondisinya semakin sejahtera. Oleh karenanya dalam masyarakat selalu dijumpai proses atau usaha perubahan yang menuju pada kondisi semakin sejahtera tersebut.

Pembangunan ekonomi ditujukan untuk dapat menjadikan masyarakat bisa hidup dengan lebih baik, memiliki tingkat kehidupan yang makmur dan sejahtera. Namun kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat hanya diukur dari tingginya pendapatan masyarakat dan pendapatan negara (*GNP*) Seringkali, nilai *GNP* tidak dapat menggambarkan pemerataan pendapatan warga masyarakat secara keseluruhan (Kompas, 10/2/2014). Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mengangkat derajat kaum miskin/marjinal agar dapat terpenuhi standar hidup layak, yang meliputi: kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar, air minum, pasar, berbagai fasilitas dasar umum, serta memiliki jaminan dan harapan-harapan hidup yang lebih baik.

Program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah yang selama ini dilakukan agar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin, seperti: PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat), Program Jamkesmas, baik tingkat daerah maupun tingkat pusat, dan lain sebagainya, tampaknya masih belum menunjukkan keberhasilannya, bahkan banyak dana pemberdayaan yang tidak sampai pada sasarannya.

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan ini masih membutuhkan kemauan politik (*political will*) dari pemerintah yang lebih kuat, serius, nyata, komprehensif

dan terus menerus dengan pengawasan yang ketat, agar tidak terjadi penyelewengan anggaran maupun penyalahgunaan wewenang. Tentu saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan dana yang besar, tetapi dengan target yang jelas dan terukur disertai langkah-langkah strategis yang berpihak pada khalayak sasaran dan penerima manfaat.

Salah satu sumber dana yang bisa diharapkan dalam mewujudkan program pemberdayaan masyarakat adalah dana dari perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR kini telah menjadi prioritas utama para pemimpin bisnis di setiap negara. Hal ini karena CSR telah menjadi perhatian dari kalangan pemerintah, aktivis, media, pemimpin masyarakat, karyawan perusahaan hingga para akademisi. Fenomena ini menandakan bahwa CSR merupakan hal penting dalam aktivitas perusahaan di suatu wilayah tertentu (Mursitama, 2011, hlm.13).

Terkait dengan pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, CSR yang dahulu hanya merupakan kegiatan *philanthropis* (menggelontorkan uang) saja, sekarang telah bergeser menjadi peran yang mengandung kemanfaatan yang lebih tinggi sehingga masyarakat penerima bantuan tidak lagi tergantung pada pemberi bantuan namun dapat hidup bersama dan bekerja bersama dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan masyarakat dan kebutuhan perusahaan secara berkesinambungan. Dalam mengaplikasikan kegiatan CSR ini peran *Public Relation* suatu perusahaan menghubungkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tujuan dari perusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya (Ardianto, 2011)

Faktanya, tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban CSR-nya. Perusahaan tersebut menganggap CSR sebagai sebuah pemborosan, karena anggaran perusahaan terserap untuk kegiatan yang tidak mendatangkan keuntungan nyata dan langsung bagi perusahaan. Jika dilaksanakan, praktek CSR yang terjadi sekarang ini berindikasi pada praktek *public relation* belaka sehingga terkesan *imagesentris* dan mendahulukan program-program yang bisa dilihat oleh publik (sebagai strategi komunikasi) dibandingkan melihat ke dalam perusahaan yang pada dasarnya memiliki posisi yang sama di dalam stakeholder CSR, yaitu buruh. Di satu sisi mengklaim telah meningkatkan standar sosial dan lingkungan pada

proses operasi atau di perusahaan intinya, akan tetapi secara bersamaan menutup mata pada pelanggaran standar perburuhan atau lingkungan yang dilakukan *subsidiary* atau perusahaan-perusahaan dalam *supply-chain* mereka.

Implikasi negatif lain muncul manakala program CSR itu sendiri tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Bantuan finansial yang didapat oleh masyarakat, justru tidak dipergunakan untuk kepentingan modal usaha, melainkan untuk memenuhi dan membeli kebutuhan lain. Hal ini berujung pada tidak meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, indikasinya terlihat pada belum menurunnya angka kemiskinan.

Selanjutnya dikemukakan “CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya” (Wibisono, 2007, hlm. 7). Sebagaimana dipaparkan oleh Christine A. Hemingway & Patrick W Maclagan dalam *Journal of Business Ethics* (2004)

Corporate Social Responsibility requires companies to acknowledge that they should be publicly accountable not only for their financial performance but also for their social and environmental record. More widely, CSR encompasses the extent to which companies should promote human rights, democracy, community improvement and sustainable development objectives throughout the world (The Confederation of British Industry). (hlm. 33-44) artinya CSR meminta perusahaan-perusahaan untuk menyadari bahwa laporan-laporan mereka harus akuntabel secara menyeluruh untuk laporan keuangan dan juga laporan-laporan yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Lebih luas lagi, CSR memberi arahan-arahan dimana perusahaan-perusahaan harus mendukung hak-hak kemanusiaan, demokrasi, peningkatan (taraf hidup) terhadap komunitas, dan pengembangan berkelanjutan di seluruh dunia.

Selanjutnya, Suharto (2006, hlm.42) menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa salah satu aspek dalam pelaksanaan CSR adalah komitmen berkelanjutan dalam mensejahterakan komunitas lokal masyarakat sekitar.

Terkait dengan area tanggung jawab sosial perusahaan, *Organization Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Wibisono (2007, hlm.42) menyepakati pedoman bagi perusahaan multinasional dalam melaksanakan CSR. Pedoman tersebut berisi kebijakan umum, meliputi:

1. *Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.*
2. *Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.*
3. *Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar, dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan.*
4. *Mendorong pembentukan human capital, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan.*
5. *Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.*

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007, hlm.99) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:

1. *Bagi Perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management).*

2. *Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut*
3. *Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.*
4. *Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut “corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.*

Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah. Sehingga diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut peduli terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Keterlibatan perusahaan dalam program CSR dilatarbelakangi dengan beberapa kepentingan. Menurut Mulyadi (2003, hlm. 4) setidaknya bisa diidentifikasi tiga motif keterlibatan perusahaan, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial pada masyarakat lokal. Tabel di bawah ini menggambarkan motif tersebut.

Tabel 1.1 Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR

Motif Keamanan	Motif memenuhi kewajiban kontraktual	Komitmen Moral
Program dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi	Pertanggungjawaban program CSR kepada pemerintah pusat dan daerah	Wacana CSR

Program tidak dilakukan setelah kontrak ditandatangani Kecenderungannya program dilakukan ketika kebebasan masyarakat sipil semakin besar pasca desentralisasi	Propaganda program CSR melalui media massa.	Propaganda program CSR melakukan media massa
--	---	--

Sumber: Mulyadi (2003, hlm. 4)

Pada umumnya, perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban formal kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan-peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan harus berusaha memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan berada (UN Global Compact, hlm. 20). Secara filantropis, perusahaan seharusnya mendistribusikan keuntungan kembali ke masyarakat setelah mereka memanfaatkan sumber-sumber di lokasi dimana masyarakat berada. Hal ini adalah kewajiban moral perusahaan (Mulyadi; 2003, hlm.5).

Berawal dari perusahaan yang mempunyai kesadaran sebagai bagian masyarakat (*corporate citizenship*) sekaligus sebagai institusi bisnis, maka konsep CSR mulai didesain menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan (*corporate strategy*). Selanjutnya, konsep CSR mulai berkembang pada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah *community development* (comdev). Comdev dilaksanakan oleh korporasi dengan mengacu pada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan ([Wikipedia.org/wiki/ Community_development](http://Wikipedia.org/wiki/Community_development)).

Perkembangan perdebatan mengenai konsep CSR tersebut dapat dicermati secara lebih rinci sebagai berikut: Pertama, menurut Sheehy dalam Fajar (2009, hlm. 9), pada hakekatnya perusahaan dibentuk dengan tujuan mencari keuntungan demi kepentingan pemegang saham. Sedangkan CSR menuntut korporasi memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perubahan paradigma dari hukum korporasi terhadap tujuan korporasi dari sekedar mencari keuntungan semata ke arah terciptanya keadilan sosial (Fajar, 2009, hlm

37). Aset yang dimiliki korporasi tidak hanya menjadi milik privat, namun harus digunakan untuk memberikan kemanfaatan umum khususnya bagi kaum yang paling tidak beruntung. Kedua, mengenai ruang lingkup CSR, pada wacana dan praktiknya mengalami perkembangan yang pesat. CSR yang awal mulanya hanya untuk perlindungan bagi buruh pada perkembangannya telah masuk wilayah lingkungan hidup, isu hak asasi manusia hingga anti korupsi (Fajar, 2009, hlm. 14). Ketiga, mengenai adanya berbagai upaya untuk menggeser pengaturan CSR dari dasar sukarela (*voluntary*) ke arah kewajiban (*mandatory*). Keempat, adanya persoalan sumber pembiayaan CSR. Persoalannya sumber pembiayaan CSR diambilkan dari sebagian keuntungan atau dianggarkan dalam biaya operasional perusahaan. Kelima, selama ini korporasi sudah diwajibkan membayar pajak dan berbagai pungutan, sehingga kewajiban CSR banyak ditanggapi oleh pelaku usaha sebagai beban tambahan.

Dari kondisi ini muncul wacana untuk memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR. Menurut Dharmapala (http://www.people.hbs.edu/mdesai/D+D_BSR.pdf), CSR disalurkan langsung kepada masyarakat sedangkan pajak dibayarkan kepada negara. Pembayaran dan penggunaan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sementara pada umumnya CSR disalurkan dengan cara yang disesuaikan dengan aktivitas bisnis korporasi dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Terlepas dari inisiatif yang dipilih (*voluntary* atau *mandatory* maupun gabungan dari keduanya), ada beberapa prinsip-prinsip penting yang diperlukan untuk melihat apakah suatu perusahaan bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang telah menerapkan prinsip kelestarian. Prinsip-prinsip ini seringkali muncul dalam berbagai standard ataupun kebijakan lingkungan yang telah diterapkan di tingkat internasional dan nasional. Prinsip-prinsip penting yang seringkali diangkat untuk menganalisis kinerja perusahaan dalam menjaga dan mengelola lingkungannya (terutama di sektor kehutanan, perkebunan, dan industry yang di akses di (www.csrreview-online.com/lihatartikel.php?id=14) antara lain:

1. Mematuhi undang undang dan peraturan-peraturan nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.

2. *Melakukan analisis terhadap rencana pengembangan/pembangunan suatu sektor secara komprehensif (melingkupi baseline environmental and social conditions).*
3. *Pembukaan lahan tidak mengorbankan kawasan yang ekosensitif (terutama hutan primer dan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi/HCVF), keanekaragaman hayati (terutama spesies terancam dan dilindungi), dan dengan metode tanpa bakar (zero burning policy).*
4. *Mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan terutama dengan menggunakan sumberdaya alam yang terbaharukan.*
5. *Menjaga kesehatan manusia dari dampak pembangunan/operasi perusahaan terutama dari penggunaan zat-zat beracun dan berbahaya*
6. *Meminimalisasi dampak negatif sosial-ekonomi bagi masyarakat setempat.*
7. *Meminimalisasi dampak dari penguasaan lahan terutama seperti pengusuran paksa, penghilangan hak-hak masyarakat adat.*
8. *Melihat dampak kumulatif dari operasi yang sedang berjalan dan rencana pengembangan di masa depan.*
9. *Partisipasi dari pihak yang terkena dampak dalam perencanaan, review dan implementasi dari operasi yang diusulkan.*
10. *Mempertimbangkan alternatif pembangunan yang ramah lingkungan dan social.*
11. *Melakukan efisiensi dalam produksi dan penggunaan energy.*
12. *Pencegahan dan pengawasan polusi dan minimalisasi limbah termasuk limbah padat dan beracun dan berbahaya.*

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, beberapa organisasi serta pihak swasta mengembangkan panduan sebagai dasar untuk mengaudit kinerja pihak produsen, industri dan pelaku usaha lainnya. Hambatan yang terjadi pada CSR adalah; 1. *Pewajiban CSR tanpa pengetahuan substansi.* 2. *Pengumpulan “dana CSR” yang menimbulkan banyak mudarat.* 3. *Perusahaan cenderung untuk menghindari internalisasi eksternalitas.* 4. *kecenderungan mayoritas masyarakat sipil untuk menyamaratakan perusahaan.* 5. *Masyarakat yang terlalu menggantungkan diri kepada perusahaan.* (www.csrindonesia.com, Jalal). Dalam pedoman CSR Bidang Lingkungan (2011) disebutkan bahwa:

“CSR menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha

untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi pengembangan ekonomi pada komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya. Menurut ISO 26000 Karakteristik dari Social Responsibility adalah kemauan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan serta aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Dalam ISO 26000 Social Responsibility mencakup 7 aspek utama, yaitu: tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek bisnis yang adil, isu konsumen serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Konsep CSR erat kaitannya dengan konsep pengembangan masyarakat atau sementara Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), sebagaimana termaktub dalam Pasal 74 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan kepatuhan perusahaan kepada peraturan sektoral yang sudah ada”.

Dengan demikian, perusahaan wajib ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan ekonomi dan pengembangan masyarakat pada umumnya. Dalam kegiatannya CSR saat ini sangat dekat dengan program pengembangan masyarakat/ *community development (comdev)*, dimana comdev merupakan bagian penting dalam proses implementasi kegiatan CSR. Hal ini didukung oleh pendapat Tirta (2011); “Telah banyak upaya perusahaan mengkaitkan aktivitas mereka dengan masyarakat di mana mereka beroperasi dan memelihara, bahkan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Namun tak sedikit pula perusahaan yang gagal memberikan makna kegiatan CSR mereka. Jadilah semua upaya itu kurang produktif”.

Porter dan Kramer (2006) dalam tulisannya *Strategy & Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility* menyebutkan dua alasan mengapa upaya gigih perusahaan dalam aktivitas CSR mereka kurang berhasil.

“Pertama, mereka berpandangan bahwa antara perusahaan dengan masyarakat saling bertolak belakang, padahal jelas sekali di antara keduanya saling terkait, saling membutuhkan. Kedua, banyak perusahaan berpikir CSR sebagai cara-cara standar yang umum untuk strategi perusahaan. Padahal justru sebaliknya CSR harus dipandang sebagai satu upaya yang paling tepat, appropriate bagi tiap strategi perusahaan”.

Kedua pakar strategi itu menyimpulkan bahwa secara strategis CSR dapat digunakan sebagai sumber perkembangan kesuksesan sosial yang luar biasa bagi perusahaan. Kesuksesan sosial ini diraih perusahaan dengan penerapan sumber

daya, keahlian dan pandangan-pandangan yang tajam dan jernih terhadap berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Sebagai contoh pada Pelaksanaan CSR di Riau Pulp yang telah membuktikan pemikiran tersebut. Nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam aktivitas perusahaan sehari-hari seiring dengan perjalanan sang waktu. Riaupulp tidak hanya melakukan aktivitas-aktivitas CSR umum yang standar dan memenuhi berbagai aturan, tetapi Riaupulp telah berhasil menciptakan suatu standar-standar baru dalam aktivitas CSR nya. Riaupulp telah melangkah *beyond compliance, raising the bar* (melampaui dari keharusan).

“Ada dua transformasi penting dalam aktivitas CSR nya, pertama transformasi hakikat CSR dari sekadar *charity* hingga membuahkan program komprehensif pemberdayaan masyarakat, *community empowerment* dengan *exit strategy* menyiapkan masyarakat yang tidak mampu menjadi terberdayakan dan sanggup memanfaatkan kredit komersial. Kedua transformasi kelembagaan CSR dari pelaksana kegiatan oleh departemen humas perusahaan menjadi sebuah yayasan independen berdiri sendiri yang khusus dibentuk dan mengurus pemberdayaan masyarakat dengan sebutan (CECOM).” (Tirta; 2011)

Pengembangan yang telah terjadi sebagaimana pada CSR Riaupulp, aktivitas CSR-nya mengarah pada program komprehensif pemberdayaan masyarakat yang tidak lagi dikelola oleh bagian humas perusahaan namun diserahkan pada sebuah yayasan independen yang berdiri sendiri yang khusus dibentuk untuk mengurus pemberdayaan masyarakat yang disebutnya dengan CECOM.

Sebagaimana yang telah dilakukan dalam CSR tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang CSR khususnya yang ada di Jawa Timur. Terkait dengan CSR berarti berwujud pengelolaan dana CSR, visi misi perusahaan, serta mengarah pada keberdayaan/keswadayaan masyarakat, dimana dalam hal ini unsur pendidikan akan masuk di dalamnya. Jalur pendidikan yang sesuai adalah Pendidikan Masyarakat, sehingga dapat dikatakan ada suatu kekhususan tersendiri dalam prosesnya yaitu dengan perspektif Pendidikan Masyarakat. Dengan memperhatikan masalah-masalah sosial yang sudah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan lewat CSR-nya yang sampai saat ini masih banyak yang belum berhasil ataupun gagal, CSR membantu pemerintah dalam ikut serta menghantarkan masyarakat untuk bisa

hidup lebih baik dari sebelumnya. Oleh karenanya, kegiatan ini menjadi mendesak karena menyangkut kepentingan masyarakat, agar mampu meningkatkan kesadarannya untuk dapat mengatasi permasalahan dalam kehidupannya sendiri, sehingga mereka tidak tergantung pada siapapun, namun dengan upayanya sendiri mampu berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, Suzana Kindervatter (1979) dalam bukunya *Non Formal Education as an Empowering Process* mengungkapkan bahwa:

Empowering was defined as a people gaining an understanding of and control over social, economic, and/or political porces in order to improve their standing in society. An empowering process is a means to bring about such understanding and control (hlm.150) artinya (Memberdayakan didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan pemahaman dan kontrol atas sosial, ekonomi, dan / atau proses politik dalam rangka meningkatkan posisi mereka di masyarakat. Sebuah proses pemberdayaan adalah sarana untuk membawa pada pemahaman dan kontrol diri.)

Kindervatter menjadikan *empowering process* sebagai suatu pendekatan untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran seseorang atau kelompok untuk memahami dan menilai atau mengevaluasi kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan atau politik, sehingga ia dapat meningkatkan martabat hidupnya dalam masyarakat. Dengan demikian proses memberdayakan diarahkan untuk menemukan pengertian/pemahaman dan kontrol diri. Hakikat pokok dari pandangan Kindervatter tentang *empowering process* ini adalah bahwa warga masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara kelompok dapat menggali dan memotivasi kesadaran dirinya sehingga mereka benar-benar memiliki keyakinan akan kekuatan dirinya sebagai manusia yang mampu hidup dan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan kekuatan itulah, mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan.

Kindervatter (1979, hlm.70) mengungkapkan bahwa "*The characteristics of an empowering process: 1) community organization, 2) worker selfmanagement and collaboration, 3) participatory approaches in adult education, research and rural development, 4) education specipically aimed at confronting oppression and injustice*" (Karakteristik dari proses pemberdayaan: 1) organisasi masyarakat, 2)

manajemen mandiri dan kolaborasi pekerja, 3) pendekatan partisipatif dalam pendidikan orang dewasa, penelitian dan pembangunan pedesaan, 4) pendidikan khusus ditujukan untuk menghadapi penindasan dan ketidakadilan.)

Karakteristik yang pertama adalah menekankan pada *community organization*, yakni mengaktifkan dinamika kehidupan masyarakat, melalui peningkatan perilaku dan keterampilan yang memadai sehingga mereka punya modal untuk mengubah status sosial ekonominya di masyarakat kelak. Untuk mencapai hal ini, mereka diaktifkan dalam kelompok-kelompok. Kedua ialah diaktifkannya hubungan kerjasama antara peserta didik dengan masyarakat desa, melalui manajemen usaha yang baik. melalui cara yang kedua ini, setiap peserta didik tergabung dalam suatu perkumpulan tertentu, menentukan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas, struktur organisasi yang jelas yang mampu mengatur sistem kerja yang baik diantara mereka. Ketiga adalah pendekatan partisipasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi yang penting pada ketiga ini ialah partisipasi masyarakat dalam mengikuti berbagai perubahan dan tuntutan jaman. Keempat ialah mengembangkan pendidikan wiraswasta. Cara ini dapat dipraktekkan melalui pembagian tanggung jawab diantara sesama warga belajar atau masyarakat. Setiap masalah dibicarakan dan dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok belajar.

Dari sebuah buku NFE (2008, hlm 9) yang berjudul ‘*The impact of Non Formal Eduaction on young people and society*’ dikatakan bahwa:

“Non-formal education is an organised educational process which takes place alongside the mainstream systems of education and training and does not typically lead to certification. Individuals participate on a voluntary basis and as a result, the individual takes an active role in the learning process. Non-formal education refers to any planned programme of personal and social education for young people designed to improve a range of skills and competencies, outside the formal educational curriculum. Non-formal education as practised by many youth organisations and groups is: voluntary, accessible to everyone (ideally), an organised process with educational objectives, participatory and learner-centred, about learning life skills and preparing for active citizenship, based on involving both individual and group learning with a collective approach, holistic and process-oriented, based on experience and action, and starts from the needs of the participants.” (“Pendidikan masyarakat adalah sebuah proses pendidikan yang terorganisir yang berlangsung bersamaan/berjalan berdampingan dengan sistem pendidikan

yang utama dan pelatihan yang pada umumnya tidak mengarah pada sertifikasi. Individu berpartisipasi secara sukarela dan sebagai hasilnya, individu mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Pendidikan Masyarakat mengacu pada program yang direncanakan; pendidikan pribadi dan sosial bagi orang-orang muda yang dirancang untuk meningkatkan berbagai keterampilan dan kompetensi, di luar kurikulum pendidikan formal. Pendidikan masyarakat seperti yang dilakukan oleh banyak organisasi pemuda dan kelompok adalah: sukarela, diakses oleh semua orang (idealnya), Proses terorganisir dengan tujuan pendidikan, partisipatif dan berpusat pada peserta didik, belajar keterampilan hidup dan mempersiapkan kewarganegaraan aktif, berdasarkan yang melibatkan individu dan kelompok belajar dengan pendekatan kolektif, holistik dan berorientasi proses, berdasarkan pengalaman dan tindakan, dan mulai dari kebutuhan peserta.)

Dalam buku NFE (2008, hlm 34) di atas, disebutkan pula bahwa Pendidikan Masyarakat juga dapat dikatakan sebagai *the power of change*:

“Be the change you want to see in the world” is the famous message of Mahatma Gandhi. Looking around us it is not hard to notice pictures that we do not like, see injustice, wish some things were different about the society we live in. Gandhi tells us to go beyond only dreaming about a better world, to take actions to make dreams come true! Of course trying to bring any social change is a huge challenge, especially if you are a young person. It seems you have too little power, too little influence on the reality. But if one starts with an initiative, there is a slight chance that more will follow. Non-formal education offers a way to turn this slight chance into certainty.”

(“Jadilah perubahan yang ingin anda lihat di dunia”, adalah pesan Mahatma Gandhi yang terkenal. Dengan melihat ke sekeliling kita, tidaklah susah untuk melihat gambaran yang tidak kita sukai, ketidakadilan, mengharapkan banyak hal berbeda tentang masyarakat di mana kita hidup. Gandhi mengajak kita untuk tidak sekedar bermimpi tentang dunia yang lebih baik, tapi bertindak untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu! Tentu saja usaha untuk membawa perubahan sosial merupakan tantangan yang besar, khususnya jika kita adalah orang yang masih muda. Bisa jadi kita hanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang kecil dalam kehidupan. Namun, jika seseorang memulai dengan inisiatif, akan ada kesempatan-kesempatan kecil lain yang mengikuti. Pendidikan non-formal menawarkan suatu harapan untuk mengubah kesempatan yang kecil ini menjadi suatu kenyataan.)

Kekuatan dari perubahan dimulai dengan inisiatif, Pendidikan Masyarakat menawarkan cara untuk mengubah kesempatan sedikit ini menjadi kepastian. Pendidikan Masyarakat memungkinkan orang-orang muda untuk mengambil inisiatif dan melibatkan orang lain dalam membuat langkah-langkah kecil menuju dunia yang lebih baik, yang didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita, sebagai inti

dari perubahan untuk lebih baik. Berkaitan dengan pribadi, keterlibatan sukarela, dan orang-orang yang didorong oleh motivasi, berkeyakinan dan mereka berkomitmen. Kekuatannya diperoleh dari dukungan yang diberikan kepadanya oleh lembaga dengan misi sosial yang sama. Memiliki kebijakan, program dan dana berdasarkan (penggunaan) Pendidikan Masyarakat, organisasi tersebut mengenalinya sebagai faktor yang relevan dan penting dalam membawa perubahan sosial. Mereka percaya kerjanya, birokrat dari organisasi internasional atau aktivis pemuda yang terlibat di tingkat akar rumput percaya bahwa Pendidikan Masyarakat adalah cara yang baik untuk menerangi masyarakat saat ini. Hal tersebut dikarenakan adanya pendekatan yang berbeda pada orang, yaitu semakin dalam di dalamnya, karena memberikan harapan untuk sukses dalam situasi di mana metode yang lain gagal. Pada tingkat pribadi, keunikan pendekatan masyarakat berasal dari fakta bahwa Pendidikan Masyarakat menyentuh pada emosi dan sikap, di mana pendidikan formal biasanya tidak bisa mencapainya. Hal ini melengkapi sekolah dan perguruan tinggi mengembangkan kompetensi yang berbeda. Proses pembelajaran Pendidikan Masyarakat masuk ke tingkat yang lebih, dalam kepribadian.

Di sinilah seorang pemimpin kaum muda perlu masuk untuk mengembangkan pemahaman pada masalah sosial dan kapasitas dalam menangani mereka. Pendekatan pendidikan masyarakat sangat penting untuk melaksanakan setiap perubahan yang ada hubungannya dengan perilaku masyarakat dan interaksi mereka; khususnya, ketika itu adalah tentang nilai-nilai yang paling penting, seperti kebebasan, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, menghormati keragaman atau kesetaraan gender. Masih terlalu banyak contoh nilai-nilai ini diabaikan, diancam dan dilanggar, sehingga mengakibatkan terjadinya masalah serius di masyarakat. Sulit hanya untuk memecahkan masalah tersebut, mereka terlalu dalam, terlalu sensitif dan terlalu rumit.

Dimana politisi gagal menemukan solusi, di mana pendekatan formal memberikan hasil yang buruk, ada Pendidikan Masyarakat yang dapat diterapkan. Dalam pengaturan masyarakat, kelompok adalah unit dasar, dan karena itu menunjukkan bahwa kita, tidak sendiri, bahwa kita tergantung pada orang lain seperti orang lain tergantung pada kita. Cara berpikir membantu untuk menciptakan

rasa kepemilikan dan tanggung jawab lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Tentu saja ada metode dan alat-alat, selain pendidikan, yang juga membantu untuk menangani masalah di masyarakat. Namun di atas kekhususan, disebutkan pendekatan pendidikan masyarakat yang membuatnya sangat cocok untuk mengatasinya. Ada beberapa bidang di mana metode pendidikan masyarakat telah terbukti membawa hasil dan telah berhasil diterapkan, baik oleh organisasi pemuda dan lembaga besar: inklusi sosial, resolusi konflik, pembangunan kapasitas, kewarganegaraan aktif, pembangunan berkelanjutan.

Memahami munculnya pendidikan yang terjadi di masyarakat, Pendidikan Masyarakat telah berada di masyarakat sejak awal, namun keberadaannya ini karena telah menyatu dalam kehidupan pada masyarakat itu sendiri sehingga keberadaannya tidak dirasakan. Akibatnya dengan nama yang dimunculkan yaitu Pendidikan Masyarakat masih banyak yang belum mengenalnya. Layanan Pendidikan Masyarakat menyatu dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dimana masyarakat tidak dapat memperolehnya dalam pendidikan formal. Djudju Sudjana (2004, hlm. 63) menjelaskan dalam bukunya Pendidikan Luar Sekolah:

”istilah pendidikan luar sekolah” telah hadir di dunia ini sama tuanya dengan kehadiran manusia yang berinteraksi dengan lingkungan di muka bumi ini. Setelah jumlah manusia makin berkembang, situasi pendidikan ini muncul dalam kehidupan kelompok dan masyarakat. Kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan sekolah lahir di dalam kehidupan masyarakat.”

Berbicara tentang Pendidikan Masyarakat tidak terlepas dari pemahaman konsep tentang kegiatan belajar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah *learning society*. Terciptanya masyarakat gemar belajar (*learning society*) sebagai wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat mendorong terbukanya kesempatan yang menuntut setiap orang, masyarakat, organisasi, institusi sosial untuk belajar lebih luas. Sehingga tumbuh semangat dan motivasi untuk belajar mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat, dan memperkuat keberdayadidikan (*educability*) agar mampu mendidik diri sendiri dan lingkungannya, serta belajar berkelanjutan untuk

memperkaya pengetahuan dan keterampilan, belajar memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas kehidupan sendiri dan masyarakatnya.

Pendidikan Masyarakat dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat, isu strategis saat ini antara lain adalah pemberdayaan masyarakat, masyarakat maju ke depan, reformasi kebijakan pendidikan pada Pendidikan Masyarakat, mengatasi *bridging gap* antara pendidikan formal dan pendidikan masyarakat. Khususnya yang terkait CSR, dengan program pemberdayaan masyarakat maka dalam hal ini Pendidikan Masyarakat dapat terlibat di dalamnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan memiliki kekuatan yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan serta kedewasaan. Untuk merealisasikan serta mengimplementasikan tujuan di atas, di perlukan suatu program layanan pada masyarakat. Dalam disertasi ini, peneliti mengambil objek penelitiannya mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Holcim Tuban Plant untuk program CSR-nya. CSR yang dilakukan oleh PT. Holcim berlangsung di desa Tambak Boyo.

Secara epistemologis tentunya penelitian ini memang perlu dilakukan berdasarkan realitas di atas, bahwa masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu CSR khususnya pada masyarakat sekitar perusahaan atau PT. Holcim tersebut, tentunya hal yang sangat diharapkan adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi CSR dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat melihat bagaimana program-program CSR dilaksanakan di lapangan dalam mendukung proses pembelajaran pada masyarakat ke arah yang lebih baik dengan indikator-indikator pemberdayaan masyarakat.

Secara aksiologi, penelitian ini sangat diperlukan karena dengan penelitian ini dapat diketahui apakah implementasi CSR mampu memberdayakan masyarakat sesuai dengan perspektif Pendidikan Masyarakat. Dalam perspektif ini kegiatan CSR dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diketahui dengan melakukan identifikasi kebutuhan warga belajar sebelum perencanaan dilakukan, di samping itu dengan keahlian dari pendidik masyarakat akan sedini mungkin dapat diantisipasi kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam

pelaksanaannya, untuk meminimalis kegagalan yang bisa terjadi setelah kegiatan berlangsung. Hal ini terkait dengan proses pembelajaran yang senantiasa dievaluasi selama proses berlangsung. Dari hasil ini akan dapat menjadi rekomendasi terhadap pihak penyelenggara, bahwa dalam CSR terkait pemberdayaan masyarakat, diperlukan profesi dari pendidik masyarakat yang mampu memberi bentuk pedoman yang jelas pada berbagai macam program CSR yang capacity building atau training-training. Pendidikan Masyarakat bisa menjadi acuan penerapan model CSR.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Mengawali pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat pada CSR, pertanyaan awal yang patut disampaikan adalah mengapa terjadi pemberdayaan masyarakat pada CSR? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya tidak ada yang salah jika kegiatan CSR digunakan untuk kegiatan filantropi atau karikatif, sebab kedua kegiatan tersebut, dalam banyak kasus, masih banyak diperlukan, baik dilihat dari kepentingan masyarakat, pemerintah maupun korporasi. Hanya saja, jika CSR digunakan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat akan memberikan manfaat langsung dan dampak ganda (*multiplier effect*) yang lebih dan mampu secara bertahap mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlepas dari ketergantungannya (belas kasihan) kepada pemerintah atau korporasi yang telah berbaik hati membantu masyarakat yang dalam kesusahan (Mardikanto, 2012, hlm. 27).

Mardikanto selanjutnya menyatakan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat, sekurang-kurangnya, masyarakat disiapkan untuk:

- a. Menyadari keadaannya, masalah yang dihadapi, peluang-peluang yang dapat dilakukan, serta memilih kegiatan perbaikan kehidupan yang sesuai dan terbaik dengan daya nalar serta kemampuannya.
- b. Melalui proses belajar bersama, berlatih untuk membuat perencanaan bagi perbaikan kehidupannya.

- c. Melakukan kegiatan mereka secara partisipatif dengan atau tanpa fasilitas pihak luar.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif terhadap semua kegiatan yang telah mereka lakukan.
- e. Memanfaatkan hasil-hasil kegiatan secara partisipatif.

Selama ini kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, pada umumnya masih banyak yang berupa program-program bantuan saja. Hal ini menjadi masalah bagi perusahaan ketika kegiatan berjalan dalam mencari solusi bagaimana CSR yang bermanfaat harus dilaksanakan agar bisa terjadi pembangunan yang berkelanjutan, dalam artian manusia penerima bantuan tersebut tidak tergantung lagi karena telah terjadi kesadaran bahwa masalah kehidupan mereka tidak dapat selamanya digantungkan pada pemberi bantuan. Mereka harus mampu mengatasi kesulitan kehidupannya sendiri dengan meningkatkan kualitas potensi dirinya. Dalam upaya menghantarkan terjadinya proses transformasi kesadaran ke arah pemberdayaan diri sendiri ini dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan, yaitu dengan Pendidikan Masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan atas kesulitan dari korporasi dalam melaksanakan CSR nya yang biasanya terkait dengan bagian human relation dari corporate, yaitu dengan adanya suatu lembaga tersendiri yang menyelenggarakan pemberdayaan pada masyarakat dengan pendekatan Pendidikan Masyarakat. Pendidikan Masyarakat bisa sebagai solusinya. Menghadapi persoalan ini, Pendidikan Masyarakat bisa menawarkan solusi, antara lain; Pertama, Pendidikan Masyarakat sebagai alternatif pengganti, penambah/ pelengkap pendidikan formal yang diarahkan pada pengembangan potensi manusia dan bukan menghafal buku teks. Kedua, pendidikan kecakapan hidup, pemberdayaan, keterampilan dan pelatihan kerja diarahkan kepada pengembangan sumberdaya manusia, Ketiga, program Pendidikan Masyarakat tidak hanya sekedar merespon kebutuhan dan peluang pasar global, tetapi menyajikan program belajar yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Keempat, Ide dan teori yang diajarkan dalam Pendidikan Masyarakat selalu punya relevansi dengan kebutuhan dan persoalan konkrit masyarakat. Apa yang diperankan dalam Pendidikan Masyarakat ini sejalan dengan

apa yang terjadi pada CSR saat ini. Maka jika peran yang mengisi kegiatan CSR ini disinergikan dengan konsepsi Pendidikan Masyarakat akan sangat tepat. Selama ini peran atau profesi Pendidikan Masyarakat memang belum banyak dikenal oleh lingkungan perusahaan, oleh karenanya pada kesempatan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan suatu gagasan baru mengenai implementasi CSR dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, yang terkait dengan sudut pandang Pendidikan Masyarakat.

Dari latar belakang permasalahan di atas serta hasil kajian empiris maka dilakukanlah penelitian untuk penyusunan disertasi yang berjudul: “***Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perpektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi di PT. Holcim Indonesia Tbk Tuban Plant)***”. Peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan CSR dalam memberdayakan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Rendahnya Pendidikan menjadi masalah utama, dari rendahnya pendidikan menyebabkan rendahnya kompetensi pengetahuan pada masyarakat.
- b. Masih belum adanya pola pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam CSR untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Implementasi program CSR sebagai sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dirasakan baik oleh lingkungan sekitar, namun pada kondisi yang sebenarnya hal ini belum disadari secara utuh oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman, dan dukungan, karena belum semua elemen masyarakat memiliki pemahaman atau tingkat persepsi yang sama terhadap program CSR.
- d. Para pendamping untuk pemberdayaan masih terkonsentrasi pada tugas kelompok pada pembelajaran (*learning teaching center*). Belum mengakses pada strategi pembelajaran yang dapat mengoptimalkan potensi yang berdampak pada lingkungan.

2. Pertanyaan Penelitian

Kajian lapangan tentang pelaksanaan CSR dapat menjawab kebutuhan dalam mengaplikasikan program-program CSR yang memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak tergantung pada pemberi bantuan. Didukung dengan kesadaran masyarakat dapat terjadi *community learning*, dimana masyarakat dapat mengatasi masalahnya sendiri.

Bagi perusahaan, implementasi CSR akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal masyarakat dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk kebaikan bersama. Sehingga rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana CSR dalam perspektif Pemberdayaan Masyarakat?

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi empiris penyelenggaraan program CSR dalam memberdayakan masyarakat?
- b. Bagaimana implementasi program CSR dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat?
- c. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan CSR dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan program-program CSR yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar lingkungannya, sehingga masyarakat tidak tergantung pada pemberi bantuan serta dengan kesadarannya, dalam masyarakat dapat terjadi *community learning*, dimana masyarakat menjadi mandiri.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mendeskripsikan kondisi empiris penyelenggaraan program CSR dalam memberdayakan masyarakat,
- b. Mengetahui proses implementasi program CSR dalam memberdayakan

masyarakat dengan perspektif Pendidikan masyarakat, melalui mengetahui proses merencanakan, melaksanakan dan evaluasi serta melihat hasil yang dicapai.

- c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari penerapan CSR dalam memberdayakan masyarakat dengan perspektif Pendidikan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dapat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis, adapun manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Segi Teoritis

1. Hasil penelitian ini Dapat memberi masukan berupa pengembangan konsep untuk kegiatan CSR dalam memberdayakan masyarakat dengan memakai sudut pandang Pendidikan Masyarakat (dikmas). Sedangkan terhadap Pendidikan Masyarakat, akan menjadi bahan masukan dalam pengembangan konsep serta aplikasi dikmas dalam berbagai sasaran terutama pada korporasi.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam membuat peraturan tentang CSR yang dimungkinkannya untuk memasukkan kajian tentang Pemberdayaan dan Pendidikan Masyarakat, yang selama ini belum pernah disinggung.

Segi Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan CSR yang biasanya dilakukan di bagian public relation, dan pada penerapannya sering mengalami kesulitan, maka dengan penelitian ini bisa menjadi masukan jika kegiatan CSR bisa dilakukan oleh bagian tersendiri yang berperspektif Pendidikan Masyarakat agar capaiannya bisa maksimal.
2. Penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam memberikan satu kajian tentang penerapan CSR yang memberdayakan masyarakat dengan sudut

pandang Pendidikan Masyarakat yang bisa dilaksanakan pula oleh perusahaan lain, khususnya bagi para warga atau masyarakat yang mendapatkan dana CSR.

E. Struktur dan Organisasi Disertasi

Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UPI (2016, hlm. 20-31), sebagai upaya untuk memudahkan dalam pemahaman penelitian ini maka penulisan disertasi ini disusun dengan struktur sebagai berikut:

BAB I berisi: Pendahuluan yaitu meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.

BAB II berisi: Landasan teoritis atau kajian teoritis, yakni konsep yang berhubungan dengan judul dan permasalahan, kerangka berfikir, dan penelitian yang relevan

BAB III berisi: Metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data serta langkah-langkah penelitian.

BAB IV berisi: Hasil dan pembahasan, penjabaran dan lokasi obyektif penelitian, temuan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V berisi: Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka dan Lampiran.